

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Naskah Eksekutif ini merupakan bagian dari dokumen Kajian Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang menuju Pangkalpinang *Smart City*. Naskah Eksekutif ini berisikan ringkasan dokumen Kajian Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang menuju Pangkalpinang *Smart City*. Dengan membaca ringkasan eksekutif ini maka secara singkat akan dapat diketahui nilai indeks Kota Pangkalpinang dalam tatanan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tercapai tujuan yang diharapkan yaitu "Pangkalpinang *Smart City*"

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Gerakan menuju 100 *Smart City* yang diprakarsai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/BAPPENAS, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kian mengarahkan setiap provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah.

Kota Pangkalpinang sebagai daerah yang terus mengalami pertumbuhan, pemerintahnya harus menyesuaikan diri dengan tuntutan jaman dan harapan masyarakat untuk menjadikan pemerintahnya sebagai pemerintahan yang *Smart Government*, artinya pemerintah yang cerdas dalam membangun layanannya pada masyarakat. Permasalahan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yaitu masih kurangnya

regulasi yang mengatur tatakelola SPBE sehingga para pengambil kebijakan sulit melakukan pengambilan kebijakannya sedangkan di level pelaksana di setiap Perangkat Daerah belum mempunyai pedoman yang jelas untuk mengembangkan dan memanfaatkan TIK dengan baik dan benar, untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang sebagai *leading sector* dalam implementasi SPBE harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melengkapi semua kekurangan tersebut.

Pengembang dan pembuatan aplikasi serta infrastruktur TIK dalam mensukseskan SPBE sudah cukup banyak dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dan Perangkat Daerah lainnya dan hal ini sangatlah penting dan mendesak untuk segera di implementasikannya semua perangkat lunak otomatisasi layanan pemerintah. Infrastruktur TIK di Pemerintah Kota Pangkalpinang sudah sangat bagus, kedepan perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia dan perangkat keamanan data dan informasi, hal ini juga untuk segera menerapkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang amanahnya yakni Pengamanan Data/Informasi Milik Pemerintah.

Tim Penyusun